

---

# **ANALISIS KEWENANGAN NOTARIS PENGGANTI DALAM PENERBITAN SALINAN & MINUTA AKTA UNTUK KETERANGAN HUKUM DI PENGADILAN**

**Pippo Inzaghi Dasan Laiskodat**  
Fakultas Hukum, Universitas Narotama  
Pippolaiskodat0@gmail.com

## **ABSTRACT**

The authority of a substitute notary in the issuance of copies and minutes of deeds for legal testimony in court and police investigations is an important issue in the legal field that requires in-depth understanding. This research aims to analyze the scope and limits of the authority of a substitute notary in the context of issuing these legal documents. The research method used is a literature study to collect information and data related to the authority of substitute notaries, as well as analyzing various regulations and related court decisions. The results of the analysis show that the authority of a substitute notary has clear limitations in the issuance of copies and minutes of deeds for legal purposes in court and police investigations. Factors such as statutory provisions, notary code of ethics, as well as court decisions are the main considerations in determining the authority of a substitute notary in certain situations. This research provides a better understanding of the role of substitute notaries in the broader legal context, as well as the relevant legal implications in notarial practice in Indonesia.

**Keywords: Authority, Substitute Notary, Copy, Deed Minute, Court**

## **PENDAHULUAN**

Penerbitan salinan dan minuta akta oleh notaris pengganti untuk keperluan keterangan hukum di pengadilan dan penyelidikan kepolisian merupakan topik yang mendalam dan penting dalam studi hukum (Taslim, Y. 2021). Peran notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat dokumen hukum menjadi krusial dalam menjaga keabsahan dan keandalan informasi yang digunakan dalam proses hukum. Dalam konteks ini, notaris pengganti, yang memiliki kewenangan untuk menggantikan notaris yang berhalangan sementara, memainkan peran yang signifikan. Pendekatan analisis terhadap kewenangan notaris pengganti dalam situasi ini memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap berbagai faktor yang memengaruhinya, termasuk regulasi hukum, kode etik profesi, dan interpretasi hukum yang berkaitan.

Pada era modern ini, di mana kompleksitas kasus hukum semakin meningkat, peran notaris pengganti dalam penerbitan dokumen hukum untuk keperluan pengadilan dan kepolisian menjadi semakin penting. Namun, pentingnya pemahaman yang tepat tentang kewenangan notaris pengganti juga tidak dapat diabaikan. Sebagai bagian dari sistem peradilan dan penegakan hukum, dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh notaris pengganti haruslah memenuhi standar keabsahan yang ketat dan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (Indriani, D. 2016)

Permasalahan terkait kewenangan notaris pengganti dalam penerbitan salinan dan minuta akta untuk keterangan hukum di pengadilan dan penyelidikan kepolisian telah menjadi fokus perhatian dalam berbagai diskusi akademis dan praktik hukum. Analisis mendalam tentang batasan dan lingkup kewenangan notaris pengganti menjadi penting untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan transparan. Dalam konteks ini, perbandingan antara ketentuan hukum yang berlaku, kode etik notaris, dan interpretasi kasus hukum yang relevan menjadi kunci untuk memahami dimensi legal dari kewenangan notaris pengganti.

Tujuan dari kajian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kewenangan notaris pengganti dalam penerbitan salinan dan minuta akta untuk keterangan hukum di pengadilan dan penyelidikan kepolisian. Melalui pendekatan analisis yang sistematis dan berbasis bukti, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan pemikiran dan praktik hukum terkait peran notaris dalam sistem peradilan dan penegakan hukum.

Dalam penjelasan lebih lanjut, penelitian ini akan mengeksplorasi berbagai aspek yang terkait dengan kewenangan notaris pengganti, termasuk landasan hukum yang mengaturnya, prinsip-prinsip etika profesi yang harus diikuti, serta pandangan dari pengadilan dan kepolisian dalam hal penggunaan dokumen yang diterbitkan oleh notaris pengganti. Diharapkan bahwa hasil analisis yang diperoleh dari penelitian ini akan memberikan wawasan yang lebih baik tentang peran notaris pengganti dalam proses hukum, serta memberikan arahan yang bermanfaat bagi praktisi hukum, akademisi, dan pihak-pihak yang terlibat dalam sistem peradilan dan penegakan hukum.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian dalam tulisan ini menggunakan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan bahan hukum dan beberapa kasus faktual. Diantara beberapa bahan hukum yang dipakai diantaranya adalah baham hukum primer, bahan hukum sekunder, dan hukum tertier. Dalam metode penelitian hukum yuridis-normatif diharapkan hasil penelitian ini akan melihat implikasi dari produk hukum akta minuta dan kewenangan notaris memberikan mandat pada notaris pengganti.

## **PEMBAHASAN**

### **1.1. Kewenangan Notaris Untuk Menerbitkan Akta**

Kewenangan notaris pengganti dalam penerbitan salinan dan minuta akta untuk keperluan keterangan hukum di pengadilan dan penyelidikan kepolisian merupakan topik yang kompleks dan memerlukan pemahaman yang mendalam. Notaris pengganti adalah notaris

yang ditunjuk untuk menggantikan notaris yang berhalangan sementara dalam menjalankan tugasnya. Dalam konteks penerbitan dokumen hukum, notaris pengganti memiliki peran yang penting untuk memastikan keabsahan dan keandalan dokumen yang diterbitkan, serta memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan lancar dan adil. Pembahasan mengenai kewenangan notaris pengganti dalam hal ini melibatkan berbagai aspek yang harus dipertimbangkan, termasuk landasan hukum, prinsip-prinsip etika profesi, serta pandangan dari berbagai pihak terkait.

Dalam hukum Indonesia, kewenangan notaris pengganti diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Pasal 48 UUJN menyebutkan bahwa notaris pengganti memiliki kewenangan yang sama dengan notaris yang digantikannya dalam hal membuat akta autentik. Namun, perlu diperhatikan bahwa notaris pengganti hanya memiliki kewenangan tersebut selama menggantikan notaris yang berhalangan. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan notaris pengganti bersifat terbatas dan bersifat sementara, sesuai dengan keperluan situasional yang muncul.

Sementara itu, dalam praktiknya, notaris pengganti juga harus mematuhi kode etik profesi yang mengatur perilaku dan tindakan notaris. Kode etik tersebut menegaskan pentingnya notaris pengganti untuk menjaga independensi, integritas, dan kejujuran dalam menjalankan tugasnya. Notaris pengganti juga harus memastikan bahwa dokumen yang diterbitkan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan terkait, serta tidak melanggar prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Dalam konteks penerbitan salinan dan minuta akta untuk keperluan keterangan hukum di pengadilan, notaris pengganti memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa dokumen yang diterbitkan merupakan salinan yang sah dan akurat dari akta asli yang telah dibuat. Hal ini melibatkan proses verifikasi dan legalisasi yang cermat untuk memastikan keabsahan dokumen tersebut. Di sisi lain, dalam penyelidikan kepolisian, dokumen yang diterbitkan oleh notaris pengganti dapat menjadi bukti yang penting dalam proses penyelidikan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, notaris pengganti juga harus memastikan bahwa dokumen yang diterbitkan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan.

Pembahasan mengenai kewenangan notaris pengganti juga perlu memperhitungkan pandangan dari berbagai pihak terkait, termasuk pengadilan, kepolisian, dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum. Pandangan ini dapat bervariasi tergantung pada interpretasi hukum yang dilakukan dan kepentingan masing-masing pihak. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan memastikan bahwa keputusan yang diambil mengenai kewenangan notaris pengganti didasarkan pada pertimbangan yang matang dan berimbang.

Secara keseluruhan, analisis kewenangan notaris pengganti dalam penerbitan salinan dan minuta akta untuk keperluan keterangan hukum di pengadilan dan penyelidikan kepolisian melibatkan pemahaman yang komprehensif terhadap berbagai aspek hukum, etika profesi, dan pandangan dari berbagai pihak terkait. Dengan memperhatikan semua faktor tersebut,

diharapkan dapat diambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan lancar, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Penerbitan salinan dan minuta akta oleh notaris pengganti untuk keperluan keterangan hukum di pengadilan dan penyelidikan kepolisian menjadi fokus perhatian yang signifikan dalam ranah hukum. Notaris pengganti memiliki peran yang penting dalam memastikan keabsahan dan keandalan dokumen hukum yang diterbitkan dalam proses peradilan dan penegakan hukum. Dalam konteks penerbitan salinan akta untuk keperluan pengadilan, notaris pengganti harus memastikan bahwa salinan yang diterbitkan adalah salinan yang sah dan akurat dari akta asli yang telah dibuat. Proses verifikasi yang cermat dan legalisasi dokumen menjadi langkah penting untuk memastikan keabsahan dokumen tersebut. Sebaliknya, dalam konteks penyelidikan kepolisian, dokumen yang diterbitkan oleh notaris pengganti dapat menjadi bukti yang krusial dalam proses penyelidikan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, notaris pengganti harus memastikan bahwa dokumen yang diterbitkan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan.

Namun, dalam melaksanakan kewenangannya, notaris pengganti juga harus mematuhi kode etik profesi yang mengatur perilaku dan tindakan notaris. Kode etik tersebut menegaskan pentingnya notaris pengganti untuk menjaga independensi, integritas, dan kejujuran dalam menjalankan tugasnya. Notaris pengganti juga harus memastikan bahwa dokumen yang diterbitkan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan terkait, serta tidak melanggar prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dalam hal ini, integritas dan profesionalisme notaris pengganti menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga notaris secara keseluruhan.

Selain itu, perlu juga dipertimbangkan pandangan dari berbagai pihak terkait, termasuk pengadilan, kepolisian, dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum. Pandangan ini dapat bervariasi tergantung pada interpretasi hukum yang dilakukan dan kepentingan masing-masing pihak. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan memastikan bahwa keputusan yang diambil mengenai kewenangan notaris pengganti didasarkan pada pertimbangan yang matang dan berimbang.

Dalam kaitannya dengan landasan hukum, kewenangan notaris pengganti diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUNJ). Pasal 48 UUNJ menyebutkan bahwa notaris pengganti memiliki kewenangan yang sama dengan notaris yang digantikannya dalam hal membuat akta autentik. Namun, notaris pengganti hanya memiliki kewenangan tersebut selama menggantikan notaris yang berhalangan. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan notaris pengganti bersifat terbatas dan bersifat sementara, sesuai dengan keperluan situasional yang muncul (Taslim, Y. 2021).

Dalam praktiknya, kewenangan notaris pengganti tidak hanya berkaitan dengan pembuatan salinan akta, tetapi juga meliputi pembuatan minuta akta. Minuta akta merupakan transkrip atau ringkasan dari akta autentik yang disiapkan oleh notaris untuk kepentingan notaris sendiri atau pihak yang berkepentingan. Dalam konteks keterangan hukum di

pengadilan, minuta akta dapat menjadi bukti yang penting untuk mendukung argumen atau klaim yang diajukan oleh salah satu pihak. Oleh karena itu, notaris pengganti harus memastikan bahwa minuta akta yang disiapkan sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak mengandung kesalahan atau kekurangan yang dapat meragukan keabsahannya.

Selain mempertimbangkan aspek hukum dan etika profesi, notaris pengganti juga harus memperhatikan risiko dan konsekuensi hukum yang mungkin timbul dari tindakan atau keputusan yang diambilnya. Kesalahan atau kelalaian dalam penerbitan dokumen hukum dapat berpotensi menyebabkan masalah hukum yang serius, termasuk pembatalan dokumen atau tuntutan ganti rugi. Oleh karena itu, notaris pengganti perlu mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat dan memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil didasarkan pada pertimbangan yang matang dan berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Dalam konteks perkembangan teknologi informasi, notaris pengganti juga dihadapkan pada tantangan baru terkait dengan keamanan dan integritas dokumen elektronik. Perkembangan teknologi informasi telah membuka peluang baru dalam penerbitan dan penyimpanan dokumen elektronik, namun juga menimbulkan risiko baru terkait dengan keamanan dan privasi data. Oleh karena itu, notaris pengganti perlu mengadopsi praktik-praktik terbaik dalam penggunaan teknologi informasi untuk memastikan bahwa dokumen yang diterbitkan tetap aman dan terjamin keabsahannya.

Dalam menjalankan tugasnya, notaris pengganti juga harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan keadilan dalam penerbitan dokumen hukum. Keadilan adalah salah satu prinsip dasar dalam sistem hukum yang menuntut perlakuan yang adil dan merata terhadap semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, notaris pengganti harus memastikan bahwa setiap keputusan atau tindakan yang diambilnya tidak diskriminatif atau tidak adil dalam pengaruhnya terhadap pihak-pihak yang terlibat.

Secara keseluruhan, kewenangan notaris pengganti dalam penerbitan salinan dan minuta akta untuk keperluan keterangan hukum di pengadilan dan penyelidikan kepolisian melibatkan pemahaman yang komprehensif terhadap berbagai aspek hukum, etika profesi, dan pandangan dari berbagai pihak terkait. Dengan memperhatikan semua faktor tersebut, diharapkan dapat diambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan lancar, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku (Dianti, V. P. (2021)..

Dalam menjalankan tugasnya, notaris pengganti juga dihadapkan pada berbagai pertimbangan yang kompleks terkait dengan keadilan dan kepentingan yang terlibat. Keadilan menjadi prinsip yang sangat penting dalam sistem hukum, yang menuntut perlakuan yang adil dan merata terhadap semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, notaris pengganti harus memastikan bahwa setiap tindakan atau keputusan yang diambilnya tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum dan etika, tetapi juga mengedepankan prinsip keadilan. Dalam hal ini, notaris pengganti harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan berbagai pihak yang terlibat dalam suatu transaksi atau proses hukum, serta memastikan bahwa setiap

keputusan yang diambil tidak diskriminatif atau tidak adil dalam pengaruhnya terhadap pihak-pihak yang terlibat.

Selain itu, dalam konteks keterbukaan dan transparansi, notaris pengganti juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap dokumen yang diterbitkan memenuhi standar kejelasan dan ketelitian yang diperlukan (Rani, F. A., & Ali, D. 2019). Dokumen hukum yang diterbitkan oleh notaris pengganti harus mudah dipahami dan tidak mengandung kebingungan atau ambigu yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, notaris pengganti harus menghindari penggunaan istilah atau frasa yang tidak jelas atau samar, serta memastikan bahwa setiap dokumen yang diterbitkan memenuhi persyaratan formal dan substansial yang ditetapkan dalam hukum.

Dalam konteks pembahasan lebih lanjut, perlu juga dipertimbangkan dampak dari keputusan atau tindakan notaris pengganti terhadap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga notaris secara keseluruhan. Notaris adalah pilar dalam sistem peradilan dan penegakan hukum, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga notaris sangat bergantung pada integritas dan profesionalisme notaris pengganti dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, notaris pengganti harus memastikan bahwa setiap tindakan atau keputusan yang diambilnya tidak hanya memenuhi standar hukum dan etika profesi, tetapi juga dapat mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga notaris sebagai lembaga yang dapat diandalkan dan independen.

Dalam menghadapi perubahan dan tantangan yang terus berkembang dalam dunia hukum, notaris pengganti juga perlu terus melakukan pembaruan dan peningkatan diri. Pengetahuan dan keterampilan notaris pengganti harus terus diperbaharui dan ditingkatkan sesuai dengan perkembangan hukum dan teknologi informasi. Notaris pengganti juga harus terus memantau perkembangan hukum dan peraturan terkait profesi notaris, serta berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan dan pengembangan profesional untuk meningkatkan kompetensinya dalam menjalankan tugasnya.

Dalam konteks hubungan kerja sama dengan pihak-pihak terkait, notaris pengganti juga perlu membangun dan memelihara hubungan yang baik dengan berbagai pihak yang terlibat dalam proses hukum. Kemitraan yang kuat dengan pengadilan, kepolisian, dan pihak-pihak lainnya dapat membantu notaris pengganti dalam menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, notaris pengganti harus aktif dalam menjalin komunikasi dan kerja sama dengan berbagai pihak terkait, serta memastikan bahwa setiap tindakan atau keputusan yang diambilnya memperhatikan kepentingan bersama dan menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang terlibat.

Maka, notaris pengganti memiliki peran yang sangat penting dalam penerbitan dokumen hukum untuk keperluan keterangan hukum di pengadilan dan penyelidikan kepolisian. Dalam menjalankan tugasnya, notaris pengganti harus memastikan bahwa setiap tindakan atau keputusan yang diambilnya memenuhi standar hukum, etika profesi, dan prinsip keadilan. Notaris pengganti juga harus terus melakukan pembaruan dan peningkatan diri, serta membangun hubungan yang baik dengan berbagai pihak terkait untuk mencapai hasil yang

optimal dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, notaris pengganti dapat menjadi mitra yang dapat diandalkan dalam proses peradilan dan penegakan hukum, serta memainkan peran yang signifikan dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga notaris secara keseluruhan.

Dalam konteks penerbitan dokumen hukum oleh notaris pengganti, penting juga untuk mempertimbangkan aspek perlindungan data dan informasi pribadi. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, keamanan data menjadi semakin penting dalam menjaga kerahasiaan dan integritas dokumen hukum. Notaris pengganti harus memastikan bahwa setiap dokumen yang diterbitkan mengikuti standar keamanan data yang ditetapkan dalam undang-undang privasi data yang berlaku. Langkah-langkah keamanan yang tepat, seperti enkripsi data dan penggunaan sistem keamanan yang kuat, harus diterapkan untuk melindungi data pribadi dan informasi sensitif lainnya yang terkandung dalam dokumen hukum.

Di samping itu, peran notaris pengganti juga dapat diperluas untuk memfasilitasi proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Notaris pengganti dapat bertindak sebagai mediator atau penengah antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dengan pengetahuan hukum yang mendalam dan kemampuan komunikasi yang baik, notaris pengganti dapat membantu pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa untuk mencapai penyelesaian yang adil dan berkelanjutan tanpa melibatkan proses peradilan yang panjang dan mahal.

Selain itu, dalam menghadapi tantangan yang terkait dengan globalisasi dan perdagangan internasional, notaris pengganti juga harus mampu memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum internasional dalam praktiknya. Perbedaan dalam sistem hukum antarnegara dapat menjadi hambatan dalam proses penerbitan dokumen hukum yang melibatkan pihak-pihak dari berbagai yurisdiksi. Oleh karena itu, notaris pengganti perlu memiliki pengetahuan yang cukup tentang hukum internasional dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perbedaan-perbedaan tersebut dalam menjalankan tugasnya.

Selain menghadapi tantangan dan kompleksitas dalam konteks hukum, notaris pengganti juga harus memperhatikan aspek profesionalisme dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika dalam praktiknya. Etika profesi notaris menekankan pentingnya integritas, independensi, dan kredibilitas dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh notaris. Oleh karena itu, notaris pengganti harus selalu mempertahankan standar etika yang tinggi dalam menjalankan tugasnya, serta menghindari konflik kepentingan atau perilaku yang tidak etis yang dapat merugikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga notaris (Yansyah, D. 2023).

Dalam menghadapi berbagai tantangan dan kompleksitas dalam praktiknya, notaris pengganti juga harus mampu mengembangkan keterampilan komunikasi yang baik. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas dan efektif dengan berbagai pihak terkait, termasuk pengadilan, kepolisian, klien, dan pihak-pihak lainnya, merupakan keterampilan yang sangat penting bagi notaris pengganti. Komunikasi yang baik dapat membantu

memastikan bahwa setiap dokumen yang diterbitkan memenuhi kebutuhan dan harapan dari berbagai pihak yang terlibat, serta mencegah terjadinya kebingungan atau ketidakpahaman yang dapat menghambat proses hukum (Indriani, D. 2016).

Jadi, peran notaris pengganti dalam penerbitan dokumen hukum untuk keperluan keterangan hukum di pengadilan dan penyelidikan kepolisian melibatkan berbagai aspek yang kompleks dan penting. Notaris pengganti harus memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan yang diambilnya mematuhi standar hukum, etika profesi, dan prinsip-prinsip keadilan. Selain itu, notaris pengganti juga harus mampu menghadapi berbagai tantangan yang muncul dalam prakteknya, termasuk tantangan teknologi, globalisasi, dan perbedaan hukum internasional. Dengan menjaga profesionalisme yang tinggi, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan, notaris pengganti dapat memainkan peran yang signifikan dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga notaris sebagai lembaga yang dapat diandalkan dalam sistem peradilan dan penegakan hukum.

Dalam konteks penerbitan dokumen hukum oleh notaris pengganti, perlu diperhatikan juga peran teknologi dalam mengoptimalkan proses kerja. Teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor, termasuk dalam bidang hukum. Notaris pengganti perlu memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses penerbitan dokumen. Penggunaan perangkat lunak khusus untuk manajemen dokumen dan otomatisasi proses dapat membantu notaris pengganti dalam mengelola dokumen dengan lebih efisien, serta meminimalkan risiko kesalahan atau kelalaian dalam proses penerbitan dokumen.

Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan tanggung jawab sosial dalam praktek notaris pengganti. Notaris pengganti harus memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan yang diambilnya tidak hanya memperhatikan kepentingan ekonomi, tetapi juga memperhitungkan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Penerbitan dokumen hukum yang bertanggung jawab dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat, serta memperkuat citra positif lembaga notaris di mata public (Prakoso, Wibby Yuda, and Gunarto Gunarto, 2017).

Dalam menjalankan tugasnya, notaris pengganti juga dapat memainkan peran yang penting dalam advokasi hak asasi manusia dan keadilan sosial. Notaris pengganti memiliki akses ke berbagai informasi dan sumber daya yang dapat digunakan untuk mendukung upaya perlindungan hak asasi manusia dan penegakan keadilan sosial. Melalui penerbitan dokumen hukum yang adil dan berkeadilan, notaris pengganti dapat membantu memperjuangkan hak-hak individu yang terpinggirkan atau kurang mampu, serta memperkuat prinsip-prinsip keadilan dan keadilan dalam sistem hukum secara keseluruhan.

Selain itu, peran notaris pengganti juga dapat diperluas untuk memberikan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang hak-hak hukum mereka dan proses hukum secara umum. Pemahaman yang lebih baik tentang hukum dapat membantu masyarakat untuk

melindungi diri mereka sendiri dari penyalahgunaan atau ketidakadilan, serta meningkatkan partisipasi mereka dalam proses hukum. Notaris pengganti dapat menggunakan platform online atau menyelenggarakan seminar dan lokakarya untuk memberikan informasi dan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat tentang hak-hak dan kewajiban hukum mereka.

Dalam menghadapi perubahan yang cepat dalam lingkungan hukum dan sosial, notaris pengganti juga harus terus melakukan pembaruan dan peningkatan diri. Pendidikan dan pelatihan kontinyu sangat penting untuk memastikan bahwa notaris pengganti tetap relevan dan kompeten dalam menjalankan tugasnya. Notaris pengganti perlu terus memantau perkembangan hukum dan teknologi, serta berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan dan pengembangan profesional untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilannya dalam praktek hukum (Mahaputera, W. A. 2021).

Oleh karena itu, peran notaris pengganti dalam penerbitan dokumen hukum untuk keperluan keterangan hukum di pengadilan dan penyelidikan kepolisian melibatkan berbagai aspek yang kompleks dan penting. Notaris pengganti tidak hanya bertanggung jawab untuk memastikan keabsahan dan keandalan dokumen yang diterbitkan, tetapi juga memiliki peran yang lebih luas dalam memfasilitasi proses peradilan dan penegakan hukum, serta berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan Masyarakat (Wahyudi, A., Erliyani, R., & Mispansyah, M. 2023).. Dengan memperhatikan semua aspek ini, notaris pengganti dapat memainkan peran yang signifikan dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga notaris sebagai lembaga yang dapat diandalkan dalam sistem peradilan dan penegakan hukum.

## **KESIMPULAN**

Dalam konteks penerbitan salinan dan minuta akta untuk keperluan keterangan hukum di pengadilan dan penyelidikan kepolisian, peran notaris pengganti adalah penting dan tidak bisa diabaikan. Notaris pengganti memiliki kewenangan yang sama dengan notaris yang digantikannya dalam membuat akta autentik, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Namun, kewenangan ini bersifat terbatas dan sementara, dan notaris pengganti harus memastikan bahwa setiap dokumen yang diterbitkan memenuhi standar keabsahan dan keandalan yang ditetapkan dalam hukum dan etika profesi.

Selain memperhatikan aspek hukum, notaris pengganti juga harus mengedepankan prinsip-prinsip etika profesi dalam menjalankan tugasnya. Kode etik profesi menegaskan pentingnya notaris pengganti untuk menjaga independensi, integritas, dan kejujuran dalam setiap tindakan dan keputusannya. Dalam hal ini, integritas notaris pengganti menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga notaris secara keseluruhan.

Pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap landasan hukum, prinsip-prinsip etika profesi, dan pandangan dari berbagai pihak terkait tidak dapat diabaikan dalam konteks penerbitan dokumen hukum oleh notaris pengganti. Perbedaan pandangan dan interpretasi

hukum dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan, dan oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan memastikan bahwa setiap keputusan didasarkan pada pertimbangan yang matang dan berimbang.

Dalam praktiknya, notaris pengganti juga harus memperhatikan risiko dan konsekuensi hukum yang mungkin timbul dari tindakan atau keputusan yang diambilnya. Kesalahan atau kelalaian dalam penerbitan dokumen hukum dapat berpotensi menyebabkan masalah hukum yang serius, termasuk pembatalan dokumen atau tuntutan ganti rugi. Oleh karena itu, notaris pengganti perlu mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat dan memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil didasarkan pada pertimbangan yang matang.

Dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi, notaris pengganti juga dihadapkan pada tantangan baru terkait dengan keamanan dan integritas dokumen elektronik. Oleh karena itu, notaris pengganti perlu mengadopsi praktik-praktik terbaik dalam penggunaan teknologi informasi untuk memastikan bahwa dokumen yang diterbitkan tetap aman dan terjamin keabsahannya. Ini termasuk penerapan sistem keamanan yang kuat dan kepatuhan terhadap peraturan privasi data yang berlaku.

Secara keseluruhan, kewenangan notaris pengganti dalam penerbitan salinan dan minuta akta untuk keperluan keterangan hukum di pengadilan dan penyelidikan kepolisian memerlukan pemahaman yang komprehensif terhadap berbagai aspek hukum, etika profesi, dan pandangan dari berbagai pihak terkait. Dengan memperhatikan semua faktor tersebut, diharapkan dapat diambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan lancar, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Yansyah, D. (2023). *Tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi notaris pengganti terhadap akta otentik yang pernah dibuatnya* (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Indriani, D. (2016). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pembatasan Kewenangan Penyidikan Terhadap Notaris (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris). *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1).
- Syamantha, T., & Zulfikar, Z. (2024). Tanggungjawab Notaris Terhadap Minuta Akta Yang Hilang Akibat Force Majeure Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(1), 71-82.
- Djami, R. A. (2023). *Kekuatan Hukum Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Republik Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Narotama).
- Taslim, Y. (2021). Akibat Hukum Terhadap Minuta Akta Sebagai Protokol Notaris Yang Musnah Dalam Penerbitan Salinan Akta.

- 
- Aman, S. S. (2017). *Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Hak Dan Kewajiban Inkar Notaris Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ternate* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Alparobi, A. (2023). *Rekonstruksi Perlindungan Hukum Notaris Terkait Pemeriksaan Di Kepolisian Berbasis Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Siswanti, N. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Terkait Akta Yang Dibuatnya Dalam Proses Penyidikan di Lembaga Kepolisian Republik Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Dianti, V. P. (2021). *Analisis Kewenangan Notaris Pengganti Dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi Menurut Uu Nomor 2 Tahun 2014* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Rani, F. A., & Ali, D. (2019). Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Ditinjau Dari Konsep Equality Before The Law. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(1), 180-201.
- Yansyah, D. (2023). Tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi notaris pengganti terhadap akta otentik yang pernah dibuatnya (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Prakoso, Wibby Yuda, and Gunarto Gunarto. "Tanggung Jawab Dan Akibat Hukum Dari Akta Notariil Yang Dibuat Oleh Notaris Pengganti Setelah Masa Jabatannya Selesai." *Jurnal Akta 4.4* (2017): 773-778.
- Mahaputera, W. A. (2021). Perlindungan Hukum Dan Pertanggungjawaban Bagi Notaris Yang Menjadi Turut Tergugat Terhadap Akta Yang Telah Dibuatnya. *Indonesian Notary*, 3(2), 36.
- Bharline, Dewangga. *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Notaris Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Diss. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2009.
- Wahyudi, A., Erliyani, R., & Mispansyah, M. (2023). Tanggung Jawab Notaris Pengganti atas Akta Notaris yang dibuat oleh Notaris tidak Berwenang dalam Kewenangan Notaris Pengganti. *Notary Law Journal*, 2(3), 234-243.